

EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI KELURAHAN TELUK PEMEDAS KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nur Alfi Sahri Ramadhani¹, Erwin Resmawan², Anwar³

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, apakah pelaksanaan rastra selama ini sudah sesuai dengan indikator ketepatan rastra: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat administrasi dan juga untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penghambat serta pendukung pelaksanaan program rastra di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara secara mendalam, dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Teluk Pemedas masih belum efektif, dimana sasaran penerima rastra masih kurang tepat, waktu pendistribusian Rastra masih terjadi keterlambatan yaitu beras tersebut tidak datang setiap bulannya melainkan per triwulan, kualitas Rastra yang terkadang kurang layak dikonsumsi, harga Rastra yang belum tepat/adanya biaya tambahan, jumlah beras yang diberikan sudah tepat jumlah yaitu pembagiannya per triwulan sebanyak 45kg/bulan, persyaratan administrasi belum cukup efektif karena tidak adanya kartu tanda penerima Rastra yang dimiliki masyarakat. Faktor penghambat pelaksanaan Rastra adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Rastra, keterlambatan datang beras, dan pendataan yang tidak tepat, untuk faktor pendukung adanya kerja sama antara pihak Kelurahan, RT, dan Masyarakat dalam program pendistribusian Rastra.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Beras Sejahtera (Rastra)

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: alfisahri449@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini, senantiasa diarahkan dan ditujukan untuk memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi perhatian pemerintah, terutama penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Walaupun demikian, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan ini banyak terjadi di negara-negara yang berkembang termasuk negara Indonesia, seperti halnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemiteraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan. Oleh karena itu untuk mengurangi masyarakat miskin yang semakin meningkat dan mensejahterakan masyarakat harus adanya program pemerintah yang tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan yang semakin tinggi setiap tahunnya. Yang mana program ini mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan dan juga perlu adanya upaya proses penyelesaian masalah kemiskinan melalui berbagai bentuk program khusus yang digulirkan oleh pemerintah pada saat ini, harus memiliki tujuan utama dalam mengurangi risiko sosial, meningkatkan kesetaraan sosial, dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan, sehingga pada nantinya masyarakat miskin dapat menikmati kehidupan yang bermartabat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu Program beras miskin (Raskin) pada bulan september 2015 telah di ganti nama menjadi program beras sejahtera (Rastra), perubahan nama dari Raskin menjadi Rastra ini dilakukan untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk membantu masyarakat miskin, agar

kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Raskin atau sekarang disebut Rastra adalah beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berekonomi lemah. Meskipun berganti nama program pusat ini masih menggunakan pedoman yang sama tanpa ada perbedaan program dengan Raskin sampai dikeluarkannya peraturan baru.

Program Beras Sejahtera (RASTRA) dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Instrumen kebijakan dari program rastra ini adalah Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa dalam hal kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan penyaluran pangan secara khusus yang diutamakan bagi ketidakkampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan memberikan bantuan pangan kepada penduduk miskin. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan mereka, maka diharapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran meningkat serta terlindungi dari rawan pangan dan kekurangan nutrisi khususnya karbohidrat.

Sasaran dari program Rastra ini adalah masyarakat yang pendapatan perkapitanya masih berada di bawah rata-rata sehingga kesulitan untuk menopang kehidupannya sehari-hari, hal ini berarti tidak semua masyarakat di Indonesia berhak untuk mendapatkan bantuan ini. Hanya keluarga yang kurang mampulah yang seharusnya mendapatkan bantuan beras melalui program Rastra ini, namun selama ini program ini mendapat banyak sorotan yang kurang baik oleh publik akibat pemberitaan yang berkembang mengenai kurang baiknya pengelolaan program ini baik secara teknis maupun non teknis.

Kemiskinan di Indonesia tidak hanya terjadi di sebagian kecil daerah namun hampir diseluruh daerah di Indonesia merupakan wilayah yang banyak terdapat masyarakat dengan taraf hidup dibawah rata-rata, salah satunya yaitu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan untuk kondisi Agustus 2018 sebesar 189,03 ribu orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,54 persen, berbeda jauh dengan BPS Provinsi Kalimantan Timur yang baru saja merilis angka kemiskinan untuk kondisi Maret 2018. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur sebesar secara persentase mengalami penurunan 0,05 persen, dari 6,08 persen pada September 2017 menjadi 6,03 persen pada Maret 2018, namun secara absolut jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur bertambah menjadi 218,90 ribu orang pada Maret 2018 yang pada September 2017 berjumlah 218,67 ribu orang. Kenaikan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur disebabkan jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami

kenaikan. Meskipun Kalimantan Timur merupakan salah satu propinsi dengan sumber daya yang melimpah tidak menutup kemungkinan propinsi Kalimantan Timur termasuk propinsi dengan jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak.

Berdasarkan data Jumlah Penerima Rastra tahun 2016-2017, pada tahun 2017 penerima rastra mengalami penurunan sebanyak 310 KPM yang menggambarkan jumlah warga miskin di Kaltim juga menurun. (*Antara Kaltim.com 16 maret 2017*). Banyaknya penerima Rastra menjadikan Kalimantan Timur menjadi salah satu propinsi yang patut di benahi dalam megurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penerima rastra yang cukup banyak. Dari data yang diperoleh ada sekitar 23.443 penerima manfaat/KK dan tiap KK menerima 15 KG perbulannya, Total kebutuhan rastra yang di peruntukkan masyarakat miskin Kukar sebanyak 4.219.740 kg pertahunnya dengan menebus seharga 1.600 per kg. (*KoranKaltim.com 14 Juni 2017*). Berdasarkan data yang di peroleh dari media salah satu kecamatan dengan jumlah kemiskinan tertinggi yaitu Kecamatan Samboja yang mencapai 27% dari jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dan angka ini cenderung meningkat tiap tahunnya. (*TribunKaltim.com 1 Agustus 2017*).

Berdasarkan dari hasil observasi Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kelurahan yang merealisasikan program rastra. Jumlah penerima Rastra di Kelurahan Teluk Pemedas pada tahun 2018 terdapat 129 KK penerima manfaat rastra yang ada di Kelurahan Teluk Pemedas, dan setiap KK masing-masing menerima sebanyak 10 kg perbulannya dan didapatkan secara gratis tanpa membayar. Dalam program rastra yang ada di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja saat ini terdapat permasalahan. Dari hasil observasi, ada beberapa hal yang terjadi dalam penyaluran program rastra. Pertama, mengenai tidak tepat sasaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang tepatnya sasaran program ini, misalnya masyarakat yang sejahtera tetapi masih menerima bantuan melalui program Rastra, dan kebalikannya masyarakat yang benar-benar berada dalam kategori miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan rastra ini, Program rastra yang semestinya disalurkan kepada keluarga miskin ternyata banyak juga yang jatuh pada kelompok masyarakat lain. Permasalahan kedua, yakni adalah data yang ada disuatu Kecamatan atau Kelurahan belum diperbarui atau belum diverifikasi kembali sehingga tidak akurat dengan keadaan masyarakat tersebut sekarang, Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga rastra yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah. Permasalahan ketiga yaitu adanya ketidaktepatan waktu pendistribusian rastra.

Dengan adanya permasalahan yang ada Pemerintah berencana menyalurkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Yaitu peralihan dari Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (RASTRA) ke Bantuan Pangan Non Tunai dengan mekanisme Penyaluran dilaksanakan melalui jaringan sistem elektronik. Pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tiga kota pada Agustus 2018, yaitu Bontang, Samarinda dan Balikpapan. Menyusul Kutai Kartanegara pada akhir 2018. Sedangkan kabupaten lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan tersalur serentak pada 2019 mendatang.

Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Salah satu Kelurahan yang sudah merealisasikan (BPNT) sejak November 2018. Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) diberikan kepada KPM setiap bulannya dengan nominal Rp 110 ribu per keluarga, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di *e-Warong* yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Karena adanya permasalahan mengenai program Rastra tersebut maka pemerintah mengubah program tersebut menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tujuan agar tidak terulang lagi kesalahan seperti pada program sebelumnya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Kerangka Dasar Teori

Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Menurut Campbell (1989) dalam Strawaji (2009:121), terdapat cara pengukuran terhadap efektivitas yang secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut: 1) Keberhasilan program, 2) Keberhasilan sasaran, 3) Kepuasan terhadap program, 4) Tingkat input dan output, dan 5) Pencapaian tujuan menyeluruh.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu

masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004:122).

Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam 4 bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Ukuran Kemiskinan

Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi kemiskinan oleh Sajogyo, diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan.

Menurut World Bank (2006) tercatat pada periode tersebut poverty head count rate di Indonesia turun sampai dengan 28,6%. Ketika krisis ekonomi menimpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997, angka kemiskinan kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 1999 menjadi sebesar 23%, kemudian angka tersebut kembali turun menjadi 16% pada tahun 2005. Namun demikian tahun 2006 angka kemiskinan kembali meningkat sebesar 1,75% sehingga menjadi 17,75%.

Indikator Kemiskinan

Menurut Sajogyo (2002:31) ada bermacam-macam indikator kemiskinan yang digunakan di Indonesia seperti konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat

pendapatan, dan tingkat kesejahteraan: 1) Tingkat Konsumsi Beras, 2) Tingkat Pendapatan, dan 3) Tingkat Kesejahteraan.

Konsep Program Beras Sejahtera (Rastra)

Menurut Pedoman Umum (PEDUM) Rastra (2017) Dalam pelaksanaannya Rastra harus mengacu pada indikator keberhasilan Enam Tepat (6T), yakni : 1) Tepat sasaran, 2) Tepat jumlah, 3) Tepat harga, 4) Tepat waktu, 5) Tepat kualitas, dan 6) Tepat administrasi.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang diteliti, yaitu efektivitas program beras sejahtera di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Metode penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono 2014:347).

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi hal yang diteliti, sehingga dengan pembatasan tersebut akan mempermudah penelitian ini dalam hal pengelolaan data. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:
 - a. Tepat Sasaran
 - b. Tepat Jumlah
 - c. Tepat Harga
 - d. Tepat Waktu
 - e. Tepat Kualitas
 - f. Tepat Administrasi
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian program beras sejahtera di KelurahanTelukPemedas

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja yang berkaitan dengan Efektivitas Program Rastra berdasarkan 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Administrasi serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam program Rastra. Dengan melakukan penelitian dan mendapatkan data-data lapangan, maka data tersebut disajikan dan menarik intisari dari hasil penelitian yang didapatkan. Berikut penulis akan membahas

hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan fokus yang telah digunakan, antara lain:

Tepat Sasaran

Tepat sasaran membahas tentang sasaran penerima program Rastra. Sasaran yang dimaksud adalah penerima rastra harus benar-benar yang layak untuk mendapatkan program tersebut. Dalam hal ini Rastra harusnya dinikmati oleh keluarga yang memang tidak mampu atau tidak sejahtera dalam segi ekonomi.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis menganalisa bahwa sasaran dari Program Rastra di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara kurang tepat sasaran, karena masih adanya masyarakat yang berhak menerima rastra tetapi tidak masuk kedalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini terjadi karena data yang ada di pusat kurang diperbaharui sehingga masih adanya masyarakat yang ekonominya cukup mendapatkan program ini sehingga tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang.

Kemudian mengacu pada konsep Efektivitas menurut Emerson dalam Handyaningrat S. (2006:16).). Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain suatu aktifitas disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pada kenyataannya sasaran yang telah ditetapkan tidak sesuai, dalam hal ini ketepatan sasaran program Rastra yang ada di Kelurahan Teluk Pemedas masih belum efektif dalam menentukan sasaran pada program Rastra tersebut.

Tepat Jumlah

Salah satu indikator keberhasilan Rastra juga dilihat dari tepat jumlah, dimana jumlah beras yang diberikan harus sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat tanpa adanya pengurangan jumlah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, maka dapat dilihat bahwa pembagian rastra sudah tepat jumlah. Jumlah rastra yang berhak diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam satu bulan yakni sebanyak 1 karung beras 15 kg/KPM atau 180 kg dalam setahun. Dapat dilihat bahwa jumlah rastra yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah sesuai dengan jumlah rastra yang berhak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terima.

Kemudian mengacu pada konsep keberhasilan Rastra Menurut Pedoman Umum (PEDUM) Rastra (2017) menyatakan bahwa jumlah beras yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus benar-benar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 15kg/bulan. Maka dapat dikatakan bahwa ketepatan jumlah Rastra di Kelurahan Teluk Pemedas sudah sesuai/tepat dengan aturan yang ada pada Pedoman Umum (PEDUM) Rastra.

Tepat Harga

Tepat harga yang dimaksud pada program Rastra yaitu harga tebus rastra yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seharga Rp.1.600/kg jadi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib membayar harga tebus sebesar Rp. 24.000 dengan jumlah beras sebanyak 15 Kg.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, bahwa mengenai tepat harga tersebut sudah sesuai dengan peraturan Rastra, walaupun sebenarnya harga tebus Rastra senilai Rp.24.000/15 kg akan tetapi karena adanya kesepakatan bersama mengenai kenaikan harga Rastra dari Titik Distribusi (TD) ke (TB) menjadi Rp.37.500/15 kg maka hal tersebut sudah sesuai dikarenakan adanya biaya transportasi.

Kemudian mengacu pada Pedoman Umum Rastra Bagian I Nomer 3 Halaman 41 yang menyatakan bahwa “Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan Harga Tebus Rastra (HTR). Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih Injuit di dalam juknis. Maka dapat dikatakan bahwa ketepatan harga Rastra di Kelurahan Teluk Pemedas sudah sesuai/tepat dengan aturan yang ada pada Pedoman Umum (PEDUM) Rastra.

Tepat Waktu

Tepat waktu yang dimaksud dalam program Rastra yaitu apabila waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran yaitu sebanyak 12 kali dalam setahun dengan pendistribusian setiap bulan sekali.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, bahwa pendistribusian beras tersebut bisa dikatakan tidak tepat waktu, hal ini terjadi karena kurangnya kordinasi dan komunikasi antar pihak Pusat, pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan mengenai keterlambatan pengiriman beras tersebut.

Kemudian mengacu pada teori Menurut Campbell (1989) dalam Strawaji (2009:121) mengenai keberhasilan program yaitu Efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat di tinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan. Sedangkan hal tersebut berbeda kenyataannya yang terjadi dilapangan. Pada keberhasilan program menurut Campbell (1989)) dalam Strawaji (2009:121) dapat dilihat melalui keberhasilan program dengan kemampuan dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran, sedangkan dari penjelasan diatas yang membahas mengenai pendistribusian beras yang seharusnya dilaksanakan setiap bulannya tetapi yang terjadi pendistribusian beras tersebut menjadi 3 bulan sekali. Maka dapat dikatakan bahwa ketepatan waktu

distribusi bantuan beras ini belum cukup memuaskan sehingga belum bisa disebut efektif.

Tepat Kualitas

Berdasarkan Pedoman Umum Rastra bahwa bahwa beras rastra adalah beras yang berkualitas baik, tidak ada hama dan tidak berbau sesuai dengan standar kualitas pembelian beras pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan, dan bisa dikatakan berkualitas apabila terpenuhinya persyaratan kualitas yang sesuai yang sesuai dengan kualitas beras BULOG. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan bahwa, kualitas beras yang dibagikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sesuai harapan masyarakat dan tidak tepat kualitas, karena beras yang diterima mempunyai kualitas yang buruk, (berbau, warnanya kusam/kekuningan, berasnya pecah-pecah, dan terdapat kutu).

Kemudian mengacu pada teori Menurut Campbell (1989) dalam Strawaji (2009:121) mengenai kepuasan terhadap program bahwa kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa kualitas beras tersebut tidak sepenuhnya memuaskan karena masih adanya beras yang didapatkan masyarakat dengan kualitas rendah, seperti halnya pada pendistribusian yang terjadi yaitu masyarakat mendapatkan 2 karung beras dengan kualitas cukup baik dan 1 karung beras dengan kualitas buruk. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kepuasan program tersebut belum tercapai sepenuhnya.

Tepat Administrasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, bahwa ketepatan administrasi program rastra di Kelurahan Teluk Pemedas belum cukup efektif dikarenakan kurang lengkapnya persyaratan administrasi yang dibutuhkan, karena pada dasarnya keluarga penerima manfaat masing-masing harus mempunyai Kartu Tanda Penerima Rastra.

Kemudian mengacu pada konsep keberhasilan Rastra Menurut Pedoman Umum (PEDUM) Rastra (2017) menyatakan bahwa Tepat administrasi, yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Dalam hal ini setiap kali Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menebus Rastra, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan Kartu Penerima Rastra sebagai bukti terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) sebagai penerima Rastra. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa belum sepenuhnya bisa disebut efektif dikarenakan belum terpenuhinya semua persyaratan administrasi

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Rastra

Faktor Pendukung

1. Adanya kerjasama antar pihak serta adanya dukungan
Adanya kerja sama antar pihak dan kerja keras dari aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, Kemudian kegiatan pelaksanaan pendistribusian rastra mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah selaku pembuat kebijakan dan penyedia anggaran. Kegiatan program Rastra juga mendapat dukungan yang kuat dari Pemerintah Kecamatan Samboja dan Kelurahan Teluk Pemedas selaku pelaksana kegiatan program Rastra. Serta dukungan yang sangat kuat dari Ketua RT selaku aparat yang paling dekat dengan RTS-PM Rastra.

Faktor Penghambat

1. Kurang Diperbaharainya Data Penerima Rastra
Dari wawancara yang dilakukan dapat diartikan bahwa yang menjadi penghambat program Rastra yang ada di Kelurahan Teluk Pemedas yaitu pendataan penerima Rastra yang kurang diperbaharui, karena pihak BPS masih belum melakukan pembaharuan data KPM meskipun telah dilaporkan oleh pihak Kelurahan. Masalah seperti diatas ini yang dapat menghambat keefektifan program Rastra.
2. Kurangnya Sosialisasi
Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Kelurahan kepada masyarakat mengenai program Rastra sehingga masyarakat kurang memahami program Rastra tersebut. Sosialisasi program yang dilakukan hanya sampai pada tingkat pemerintah desa saja. Kemudian untuk di tingkat masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi langsung. Dengan demikian pemahaman masyarakat terhadap program Rastra tidak dapat dipahami secara jelas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Sasaran dari Program Rastra di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara kurang tepat, karena masih adanya masyarakat yang berhak menerima Rastra tetapi tidak masuk kedalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini terjadi karena data yang ada di Pusat kurang diperbaharui sehingga masih adanya masyarakat yang ekonominya cukup mendapatkan program ini.
2. Rastra yang dibagikan oleh pihak Kelurahan dilakukan per Triwulan (3 bulan sekali), sedangkan ketentuan yang berlaku adalah 15kg/bulan. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) memperoleh beras dengan jumlah 45kg/3 bulannya dan mendapatkan 180 kg/tahunnya. Sehingga pembagian beras yang diberikan sudah tepat jumlah.
3. Biaya yang dikenakan dari pihak di Kelurahan Teluk Pemedas adalah sebesar Rp. 24.000/15 kg sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi pada saat

pendistribusian dilapangan yang dilakukan oleh masing-masing ketua RT harga tersebut dinaikkan menjadi Rp. 37.500/15 kg dikarenakan adanya biaya tambahan untuk biaya angkut yang memang sudah disepakati masyarakat.

4. Pendistribusian beras tersebut bisa dikatakan tidak tepat waktu karena pendistribusian/pembagian beras yang ada di Kelurahan Teluk Pemedas tidak dilakukan setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang ada di Pedoman Umum (PEDUM) Rastra. Pembagian beras tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, hal ini terjadi karena pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan mengalami keterlambatan dalam penerimaan beras tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa ketepatan waktu distribusi bantuan beras ini belum cukup memuaskan sehingga belum bisa disebut efektif.
5. Beras yang diterima oleh rumah tangga penerima Rastra belum tepat kualitas, karena beras yang diterima oleh rumah tangga miskin mempunyai kualitas beras yang tidak memuaskan/buruk, karena distribusi Rastra dilakukan per triwulan, jadi Rastra diterima 3 karung per bulannya, sehingga beras yang diterima oleh rumah tangga penerima Rastra ini terkadang dari 3 karung, 1 karung yang mempunyai kualitas beras yang buruk (berbau, warnanya kusam/kekuningan, berasnya pecah-pecah, dan terkadang terdapat kutu), dan 2 karung mempunyai kualitas yang bagus.
6. Program Rastra di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara belum tepat administrasi dikarenakan kurang lengkapnya persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Keluarga penerima manfaat seharusnya mempunyai kartu tanda penerima Rastra, akan tetapi keluarga penerima manfaat tidak mempunyai kartu tanda penerima dan hanya menggunakan KK dan KTP saja yang dibawa pada saat pengambilan Rastra.
7. Faktor Pendukung Rastra di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja ialah:
 - a. Adanya kerja sama antar pihak serta adanya dukungan.
Adanya kerjasama yang baik antar berbagai pihak antar elemen diantaranya pihak Kabupaten, Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah, Staff lainnya. Serta melibatkan Ketua Rt di Kelurahan Teluk Pemedas selaku aparat yang paling dekat dengan RTS-PM Rastra. Kemudian Program Rastra juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah sebagai pembuat kebijakan dan penyedia anggaran.
Sedangkan faktor penghambatnya ialah:
 - a. Kurang diperbaharainya Data Penerima Rastra.
Dalam hal ini yang dimaksud yaitu, data yang lama masih belum diperbaharui sehingga masyarakat yang seharusnya tidak lagi mendapatkan manfaat program tetapi masih mendapatkan manfaat program tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pihak BPS dan Kelurahan mengenai ketidaksesuaian data dengan kondisi sebenarnya.

b. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Kelurahan kepada masyarakat mengenai program Rastra sehingga masyarakat kurang memahami program Rastra tersebut. Sosialisasi program yang dilakukan hanya sampai pada tingkat pemerintah desa saja. Kemudian untuk di tingkat masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi langsung. Dengan demikian pemahaman masyarakat terhadap program Rastra tidak dapat dipahami secara jelas.

Saran

1. Perlunya ada pendataan ulang setiap tahunnya dari pihak Kelurahan agar tidak adalagi kesalahan sasaran dalam pembagian Rastra.
2. Dalam proses pendataan rumah tangga miskin, indikator yang digunakan untuk menentukan rumah tangga sasaran harus menangkap kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Teluk Pemedas, dan diharapkan pegawai Kelurahan Teluk Pemedas dalam mendata bisa langsung turun kelapangan dan berinteraksi untuk melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya.
3. Perlu adanya sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur kegiatan Rastra kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) agar KPM memahami apa itu program Rastra yang sebenarnya. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu berupa pengumpulan warga, pembagian brosur, pemasangan spanduk atau melalui media sosial untuk memudahkan penyebaran informasi dengan lebih cepat dan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
4. Perlu adanya komunikasi antar pihak Pusat, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan mengenai ketepatan waktu pendistribusian Program Rastra agar tidak adanya lagi keterlambatan waktu dalam pendistribusian.
5. Diperlukannya pengecekan kualitas beras sebelum didistribusikan kemasyarakat agar beras yang diberikan tidak mengecewakan masyarakat.
6. Perlu adanya Kontribusi dari pihak Kelurahan untuk membuatkan KartunTanda Penerima Rastra sebagai tanda bukti ketika pendistribusian beras.
7. Diharapkan pihak Kelurahan agar memberitahu kesetiap ketua RT agar tidak ada biaya tambahan yang diberikan kepada masyarakat, meskipun hal itu sudah disepakati bersama dan masing-masing pihak tidak ada yang keberatan. Namun ada baiknya jika harga tebus Rastra itu disamakan dengan harga yang ditentukan dari Pemerintah Pusat.
8. Agar pendistribusian program berjalan sesuai dan mencapai tujuan dengan indikator ketepatan 6T, para penyelenggara program harus lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan program agar tidak hanya sebatas formalitas program berjalan tetapi tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan juga melakukan pengawasan dan evaluasi agar segera dibenahi dan dijalankan berdasarkan pedoman yang ada.

9. Perlu adanya sangsi yang diterapkan dari pemerintah kepada aparaturnya pelaksana program Rastra mengenai ketidaktepatan pelaksanaan pendistribusian Rastra agar tidak adanya lagi kesalahan/kekurangan yang terjadi kedepannya.

Daftar Pustaka

- Campbell. 1989. *Riset dalam Efektifitas Organisasi Terjemahan Sahat Simamora*. Jakarta: Erlangga.
- Handyaningrat, Drs.Soewarno. 2006. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : PT.Toko Gunung Agung.
- Kurniawan Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Nasikun. 2001. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Sajogyo. 2002. *Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan*. Jakarta: Gra-media.
- Starawaji. 2009. *Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Jarnasy.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen-dokumen:

- Pedoman Umum Subsidi Rastra (PEDUM RASTRA) 2017
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. The World Bank.